BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil temuan penelitian mengenai pengaruh Good Governance dan Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderasi pada OPD Kota Medan, bisa disimpulkan:

1. Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *Good Governance*, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin meningkat. Temuan ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai penerapan *Good Governance* dalam kategori sangat baik, serta nilai rata-rata kualitas laporan keuangan yang juga tergolong tinggi.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin meningkat. Temuan ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai penerapan SAP dalam kategori baik, serta didukung oleh nilai rata-rata kualitas laporan keuangan yang juga tergolong tinggi.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien

interaksi yang tidak signifikan (*T-statistics* 0,642 < 1,96), sehingga menunjukkan bahwa penerapan SPI tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun penerapan SPI tidak berperan sebagai variabel moderasi, secara deskriptif penerapannya sudah tergolong baik dan mampu mendukung proses pengawasan instansi. Namun, perannya lebih sebagai sistem kendali independen yang melekat pada operasional administratif sehari-hari.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien interaksi yang tidak signifikan (*T-statistics* 1,571 < 1,96), sehingga menunjukkan bahwa penerapan SPI tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun penerapan SPI tidak berperan sebagai variabel moderasi, secara deskriptif penerapannya sudah berjalan dengan baik. Namun, perannya lebih sebagai instrumen pelengkap baku yang berjalan pada jalurnya sendiri secara terpisah dari standar teknis akuntansi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (OPD Kota Medan)

   Disarankan untuk terus meningkatkan penerapan good governance dalam

pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini penting karena berdasarkan hasil penelitian, good governance terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, OPD juga perlu meningkatkan konsistensi dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan semakin relevan, andal, dan mudah dipahami.

2. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

   Meskipun sistem pengendalian intern belum terbukti mampu memoderasi hubungan antara good governance dan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat penerapan SPI secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan internal, pemantauan terhadap prosedur keuangan, serta peningkatan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan pengendalian intern. Dengan pengendalian intern yang lebih efektif, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat semakin meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, atau komitmen organisasi. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada pemerintah daerah lainnya agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.